

METODE PENDEKATAN “HITS” SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DAERAH LAMPUNG)

Yuni Andono Achmad

Universitas Gunadarma, yuniando@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS) memperkenalkan pendekatan HITS atau Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial dalam perencanaan pembangunan di tingkat Pusat. Di dalam tulisan berikut ini, penulis menyetujui pemikiran bahwa HITS dapat juga dilakukan untuk membantu upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, terlebih lagi di daerah. Daerah yang menjadi kajian adalah provinsi Lampung, dengan lokus kota Bandar Lampung. HITS akan menjadi metode yang sekiranya efektif dan efisien di level kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan berasumsi bahwa metode gotong royong adalah ciri masyarakat Indonesia (seperti pernyataan Ir Sukarno bahwa Pancasila apabila diperas hasilnya adalah gotong royong) maka kebersamaan itulah yang akan menjadi kunci untuk mengatasi problematika pembangunan. Gotong royong dalam hal ini diturunkan menjadi level praktis yaitu holistik dan integratif. Selain menjadi tema (thematically) yang disepakati oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) juga harus terfokus di kantung kemiskinan sebagai lokus -bagian aspek spasial.

Kata kunci. Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan ekstrem, Perencanaan pembangunan, Ego sektoral, Silo Beaucracy

PENDAHULUAN

Istilah HITS -atau Holistik Integratif Terpadu Spasial- mengacu pada konsep perencanaan dan pengembangan wilayah yang holistik, integratif, tematik, dan spasial. Pendekatannya adalah mempertimbangkan aspek-aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam pengembangan wilayah, seperti aspek ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan fisik. Pendekatan Holistik berarti mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara menyeluruh, sedangkan Integratif berarti mempertimbangkan keterkaitan antara aspek-aspek tersebut. Pendekatan Tematik berarti mempertimbangkan tema atau isu khusus dalam pengembangan wilayah, dan pendekatan Spasial berarti mempertimbangkan aspek ruang dan

lokasi dalam pengembangan wilayah. Semua aspek ini diintegrasikan dalam kerangka HITS untuk mencapai pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan komprehensif.

Berbagai macam bentuk pendekatan telah diupayakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pada setiap rejim pemerintahan, usaha Negara dalam upaya mengurangi kemiskinan selalu menjadi prioritas dalam pembangunan. Di era presiden Sukarno (yang oleh Orde Baru disebut dengan “Orde Lama”), beliau pernah mengatakan tentang merdeka dari kemiskinan. Atau lebih tepatnya pernyataan Ir Sukarno adalah, “Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial”. Kemudian

Presiden Soeharto mencanangkan program pengentasan kemiskinan. Hal yang sama di masa presiden Habibie dan presiden Wahid. Kemudian presiden Megawati menyebut mengenai upaya penanggulangan kemiskinan. Di masa presiden SBY dengan pengurangan kemiskinan. Lalu di masa atau periode kedua presiden Joko Widodo dengan penurunan kemiskinan ekstrem.

Salah satu bentuk pendekatan yang diperkenalkan sejak 4 (empat) tahun yang lalu adalah HITS atau *holistic integrative thematic spatial*. Holistik berarti cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Tematik mengarah dengan suatu tema atau pokok permasalahan sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain. Sedangkan pendekatan spasial lebih sering digunakan dalam keilmuan geografi (konsentrasi keruangan) -yang merupakan pendekatan yang khas sebagai bagian dari studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya.

Di tahun 2021 pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas di 7 (tujuh) provinsi. Untuk tahun 2022, pemerintah memperluas cakupannya dengan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2022 juga dilakukan pemerintah dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dukungan bagi penurunan kemiskinan ekstrem dilakukan pemerintah dengan diterbitkannya

Inpres No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres ini diharapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dapat diwujudkan melalui melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Inpres ini telah menetapkan bahwa pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui 3 (tiga) strategi kebijakan, yaitu (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Penurunan Jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Menjadi pertanyaan penelitian adalah, metode apa yang sekiranya efektif dan efisien di level kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan berasumsi bahwa metode gotong royong adalah ciri masyarakat Indonesia (seperti pernyataan Ir Sukarno bahwa Pancasila apabila diperas hasilnya adalah gotong royong) maka kebersamaan itulah yang akan menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan.

Bagaimana menurunkan gotong royong dalam level perumusan kebijakan? Pertama kami mendefinisikan dulu arti gotong royong. Gotong royong berasal dari kata “gotong” berarti mengangkat, atau bisa juga: bekerja. Sedangkan “royong” berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong memiliki arti bekerja bersama-sama. Seperti tolong menolong, maupun bantu membantu diantara anggota dalam suatu komunitas.

Sedangkan menurut Pudjiwati Sakjoyo dalam buku “Sosiologi Pedesaan”, menyatakan bahwa gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara orang-orang yang ada di berbagai macam lapangan kegiatan sosial baik itu menurut hubungan

kekerabatan, tetangga, dan efisien yang bersifat praktis, serta ada pula kerjasama lainnya.

Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat yang dituliskan dalam buku yang berjudul “Pengantar Antropologi”, menyatakan bahwa gotong royong merupakan bentuk kerjasama dimana seseorang dikatakan beriman bila dirinya telah mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri.

Makna gotong royong menurut hemat penulis dapat diderivasikan menjadi holistik dan integratif. HITS. Pengertian holistik di sini adalah keseluruhan (komprehensifitas) dari semua pihak tahu, mengerti dan mau bekerjasama. Selama ini memang terjadi semacam ego sektoral atau *silo beaurecracy*.

Terminologi *silo beaurecracy* selama ini lebih dikenal dengan ego sektoral. Silo dalam organisasi jelas menjadi ancaman bagi produktifitas dan program perbaikan yang dijalankan. Untuk menjadi lembaga yang terus berkembang dan memperbaiki, seluruh departemen dan manajemen harus mampu bekerja bersama dalam mencapai target, dengan *shared value* yang sama. Seluruh sendi organisasi harus bergerak dengan sinkron menuju satu arah yang menjadi tujuan bersama. Mentalitas silo dapat terjadi ketika sebuah tim atau departemen berbagi tugas umum tapi berdasarkan pada kekuasaan dan status dari kelompok mereka. Mereka cenderung enggan berbagi sumber daya dan ide dari departemen atau bagian lain. Mereka menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang mereka kembangkan sendiri. Padahal, berbagai masalah yang mereka hadapi seringkali saling berkaitan dengan kinerja dan masalah di departemen lain.

Terkait definisi dari holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS), akan disampaikan sebagai berikut.

Bahwasanya dalam dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian PPN telah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut,

1. Pendekatan holistik

Holistik berarti cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Kata *holistic* berasal dari bahasa Inggris yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Jika kata holistik ini dipakai dalam rangka pelayanan kepada orang lain maka mempunyai arti layanan yang diberikan kepada sesama atau manusia secara utuh, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang mendapatkan perhatian seimbang. Dalam ilmu geografi, holistik adalah suatu filsafat yang menekankan bahwa individu dapat menemukan identitas tujuan dan makna hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, nilai-nilai spiritual dan lingkungan alam. Tujuan Pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, demokratis, dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.

2. Pendekatan integratif

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada 1 (satu) Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau SKPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada SKPD lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas. Untuk mencapai prioritas nasional kedaulatan pangan misalnya, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktifitas lahan eksisting dan menyetop konversi lahan produktif, tapi juga melakukan reformasi agraria, pencetakan sawah baru, pengendalian harga dan impor pangan. Jadi diperlukan adanya kombinasi dari berbagai program dan kegiatan.

3. Pendekatan Tematik

Pengertian tematik menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tema atau pokok permasalahan/ tema sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain. Jika dihubungkan dengan pembelajaran tematik maka hal tersebut akan memberikan pengalaman bagi siswa yang ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam menghubungkan antara konsep belajar yang telah dilakukan dengan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan perencanaan holistic-tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar SKPD yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/ Lembaga dan antar SKPD -baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Misalnya dalam pencapaian prioritas nasional kedaulatan pangan, ia memerlukan koordinasi antar K/L antara lain Kementan, Kementerian PUPR, Kemenag, Kemendag serta pemerintah daerah.

4. Pendekatan Spasial

Dalam KBBU kata “spasial” diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Pendekatan spasial sendiri lebih sering digunakan dalam keilmuan geografi (konsentrasi keruangan). Ia merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan bagian dari studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, seorang ahli geografi sangat memperhatikan faktor letak, distribusi (persebaran) inter relasi serta interaksinya. Salah satu pendekatan keruangan tersebut misalnya kita contohkan adalah adanya sebidang tanah yang harganya mahal karena tanahnya subur, dan terletak di pinggir jalan. Artinya penilaian pertama adalah pada tanah berdasarkan produktifitas pertanian, sedangkan yang kedua menilai tanah berdasarkan produktifitas nilai ruangnya yaitu letak yang strategis. Pertimbangan dimensi ruang (spasial) dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki 3 (tiga) cara pandang (menurut Kartasasmita, 1977, sebagaimana dikutip Kustiwan, 2010: 5, 53). Pertama, dimensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah maupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota/ daerah/ wilayah sebagai suatu entitas (kesatuan) bebas yang pengembangannya tidak terkait dengan kota, daerah maupun wilayah lain. Pola penekanan perencanaan pembangunan di suatu daerah/ kota bersifat mandiri. Kemudian kedua pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pola perencanaan pada suatu jurisdiksi ruang atau wilayah tertentu dan dapat digunakan sebagai bagian dari pola pembangunan nasional. Berikutnya ketiga pembangunan di daerah adalah merupakan instrumen

bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah. Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa SKPD untuk dintegrasikan, yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/ kota.

Jadi perencanaan pembangunan daerah berdasar ketiga pendekatan diatas diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran dari agenda prioritas nasional. Pendekatan baru penyusunan RKP diharapkan dapat memacu kerjasama yang kuat antara K/L. Pendekatan holistik-tematik dan integratif menyaratkan K/L bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas. Peran Bappenas dan Bappeda provinsi adalah sebagai integrator kinerja setiap K/L, Pemda (kabupaten/ kota), dan SKPD.

Belu ada peneltian sebelumnya terkait HITS ini. Namun sejak Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2019 metode HITS telah dipakai, dan diterjemahan dalam program pembangunan di daerah seperti Lampung, yang dapat disimak di <https://bappeda.belitung.go.id/mengenal-tiga-pendekatan-perencanaan-pembangunan/>.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif dan didukung data kuantitatif hasil pengolahan mempergunakan *excel*.

Penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang

dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan (Sumodiningrat, 2007, dan

<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>). Dalam studi kuantitatif, data mentah dapat segera diproses. Namun, data dalam studi kualitatif membutuhkan proses sistematis yang lebih dalam.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

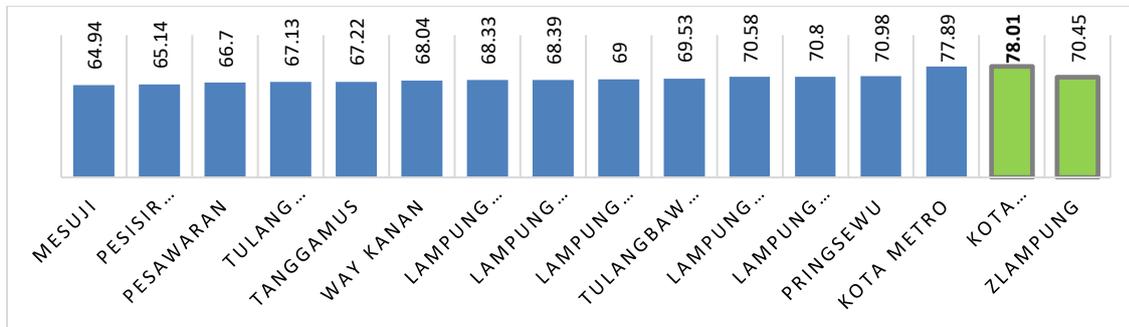
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

Sedangkan berdasar pendapat Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini juga dipakai studi komparasi dengan melihat berbagai literatur yang ada, kemudian dikelompokkan menurut temanya, dan berdasar rumpun data yang relevan.

Sedangkan Lokasi penelitian -yang dipilih secara random- adalah di provinsi Lampung, dengan lokus yang lebih kecil yakni kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi di Bandar Lampung dikarenakan letaknya yang strategis, sebagai ibukota provinsi dari daerah yang merupakan pintu pertama

memasuki pulau Sumatera -dari pulau Jawa. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kota Bandar Lampung merupan tertinggi di provinsi Lampung, seperti terlihat di tabel berikut.



Gambar 1. IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Sumber: diolah dari BPS tahun 2020

Kemudian selain itu, sistem informasi pemerintah daerah kota B. Lampung ini tergolong sangat bagus, sehingga mempermudah pencarian data pendukung. Salahsatunya adalah portal resmi e-government di <https://bandarlampungkota.go.id/> Dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bandar Lampung di laman portal tersebut, didapatkan beberapa persoalan pembangunan. Penelitian ini berangkat dari beberapa persoalan pokok terkait pembangunan manusia, ekonomi, dan kewilayahan. Rinciannya besarnya adalah sebagai berikut

1. Pembangunan manusia belum optimal, terlihat dari: *pertama* Terbatasnya aksesibilitas dan mutu pendidikan usia dini, serta pendidikan dasar dan menengah pertama, *kedua* Terbatasnya cakupan pelayanan Kesehatan.
2. Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah yang masih terbatas, terlihat dari *pertama* Produktifitas sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan yang masih

terbatas, *kedua* Pengembangan potensi pariwisata yang masih terkendala banyak faktor negatif.

3. Pembangunan kewilayahan yang belum optimal, terlihat dari *pertama* Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih terbatas, *kedua* pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, DAS, situ, danau, yang masih terbatas, dan *ketiga* Pembangunan kawasan permukiman dan penyediaan rumah layak huni yang masih terbatas

Data yang akan diolah adalah terkait (a) Indeks pembangunan manusia, (b) Rata-rata lama sekolah, (c) Usia harapan hidup, (d) Kemiskinan, dan (e) Indeks pemberdayaan manusia dan kebudayaan. Data tersebut kemudian diagregasi, yang dilakukan untuk mendapatkan nilai bersifat *summary* atau agregat komponen yang telah dihitung dan dibobotkan sebelumnya. Beberapa metode agregasi yang umumnya digunakan adalah Agregasi Linear (LA), Agregasi Geometrik (GA), Agregasi Harmonis (HA). Metode agregasi linier (*Linear*

Aggregation/LA), digunakan jika setiap indikator memiliki ukuran yang sama dan mendasarkan pada proporsionalitas bobot indikator, sedangkan GA cenderung digunakan pada pembentukan indeks komposit yang mengagregasikan skor-skor bernilai tinggi untuk mendeteksi perubahan kecil yang terjadi.

Pada nilai indeks dengan indikator-indikator yang memiliki perubahan capaian tahunan cenderung rendah, memiliki ukuran yang sama dan mendasarkan pada proporsionalitas bobot indikator, secara statistik penggunaan metode Linear Agregasi untuk agregasi indeks dan dimensi dirasakan lebih tepat dibandingkan penggunaan metode agregasi lainnya. Adapun rumus agregasi untuk menghitung nilai dimensinya adalah:

$$CI_c = \sum_{q=1}^Q w_q I_{qc}$$

yang artinya adalah: Q = Banyaknya variabel, W_q = Penimbang variabel ke - , dan I_{qc} = nilai variabel ke-q yang telah distandardisasi. Apabila dirinci lebih mendalam lagi, maka persoalan yang terjadi dengan lokus kota Bandar Lampung adalah terkait 3 (tiga) masalah utama sebagai berikut, sedangkan untuk mengidentifikasi permasalahan Pembangunan Daerah

1. a. Masalah utama: Upaya pembangunan manusia tidak optimal.
- b. Masalah turunan:
 - Tidak meratanya distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan masih tinggi. Indeks atau tingkat rasio gini masih tinggi, mencapai 0,359 persen.
 - Tingginya jumlah penduduk miskin, atau masyarakat di bawah garis kemiskinan. Data tahun 2020 menunjukkan angka 8,81 persen.
 - Tingginya jumlah pengangguran mencapai 8,78 persen.

- Tingginya pertumbuhan penduduk, masih di tingkat 1,109 persen.
 - Rendahnya angka rata-rata lama sekolah. Belum mencapai 12 tahun, baru sebesar 10,93 tahun.
2. a. Masalah utama: Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah yang masih terbatas
 - b. Masalah turunan:
 - Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB, masih rendah.
 - Pertumbuhan ekonomi melambat, terjadi kontraksi sebesar 1,85 persen semasa pandemi.
 - Laju inflasi fluktuatif. Tahun 2020 meningkat walaupun masih terkencali -yakni mencapai 1,93 persen.
 3. a. Masalah utama: Pembangunan kewilayahan masih rendah
 - b. Masalah turunan:
 - Tingginya persentase kawasan kumuh, permukiman liar (*squatter area*) dan rumah tidak layak huni atau RTLH. Persentase mencapai 2.83 persen.
 - Perlunya ditingkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang saat ini baru mencapai 60. Sedangkan target nasional adalah 68,5.
 - Kota BL termasuk ke dalam zona rawan ketersediaan air tanah. Tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Penyediaan infrastruktur jalan trans/inter kabupaten di Lampung

HASIL DAN PEMBAHASAN

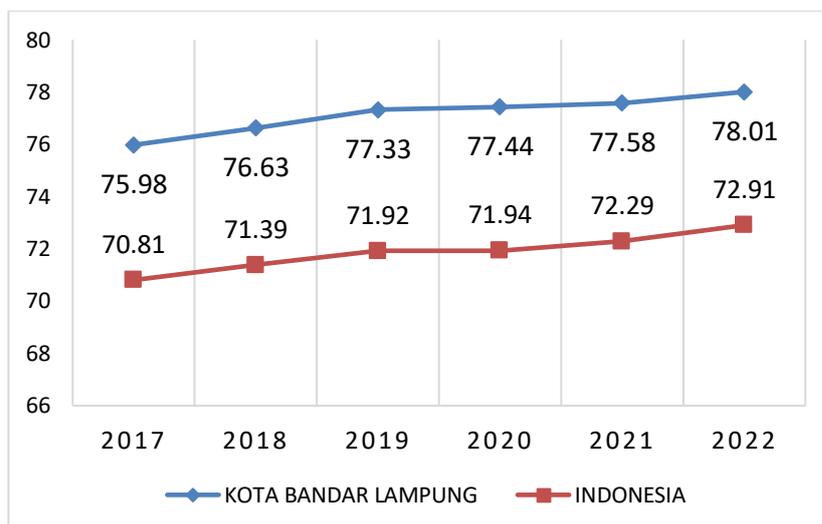
Dengan mempergunakan HITS pada tahap pertama proses pengolahan data, akan dilihat terlebih dahulu hasil olahan indeks pada level provinsi, yakni provinsi Lampung. Dari perhitungan indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) provinsi Lampung mengalami peningkatan 3,15 persen dari tahun sebelumnya. Pembahasan berikutnya kepada 3 (tiga) dimensi.

Dimensi pertama Lampung -terkait dimensi kualitas manusia Indonesia- mencapai angka 66,41. Dimensi kedua -y.i. dimensi kapasitas manusia Indonesia- Lampung meraih nilai 62,94, sedang dimensi ketiga -mengenai pembangunan karakter manusia- sejumlah 54,72. Jika dibandingkan antara ketiganya, Lampung memiliki raihan terbesar pada dimensi pertama, dan dimensi ketiga adalah yang terkecil. Pada dimensi pertama -dimensi kualitas manusia Indonesia- terdapat 13 indikator. Dari ke-13 indikator tersebut yang pertumbuhannya positif di provinsi Lampung ialah sebanyak 7 (tujuh) indikator. Dari ketujuh indikator yang meningkat tersebut, ada 1 (satu) yang mampu tumbuh hampir dua kali lipat, tepatnya sebesar 93,20 persen, yaitu indikator “Persentase rumah tangga yang anggotanya ada yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam”.

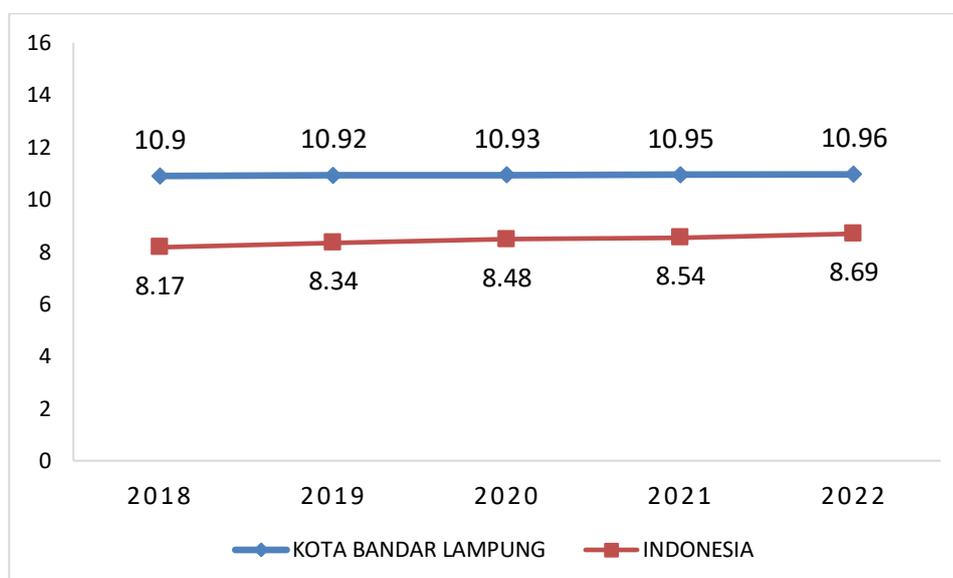
Pada dimensi kedua, yaitu dimensi kapasitas manusia Indonesia. Di dimensi 2 (dua) ini terdapat 9 (sembilan) indikator. Dari ke-9 indikator di Lampung terjadi kenaikan pada 3 (tiga) indikator, sedangkan 6 (enam) indikator lainnya mengalami penurunan. Kenaikan terbesar pada indikator “Persentase rumah tangga yang terlibat/menonton kegiatan seni budaya” yang meningkat sebesar 82,75 persen. Kemudian indikator “Persentase pemuda yang berwirausaha di sektor non pertanian” naik sebesar 8,36 persen. Terakhir kenaikan adalah indikator “Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan” meningkat 2,5 persen.

Pada dimensi ketiga, terkait dimensi karakter manusia Indonesia. Dari total 8 (delapan) indikator yang ada di dimensi ketiga ini, terdapat 5 (lima) indikator yang mengalami peningkatan. Dari 5 (lima) indikator itu ada 2 (dua) indikator yang naik di atas 2 (dua) digit, yaitu naik mendekati 60 persen, dan mendekati 11 persen. Indikator “Persentase rumah tangga yang menangani sampah secara ramah lingkungan (tidak dibuang ke sungai/got/ selokan, dibakar, ditimbun/dikubur, dibuang sembarangan, atau lainnya)” melonjak drastis 59,42 persen. Seterusnya indikator “Persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar” meningkat 10,81 persen.

Kemudian berikutnya pada aspek lokus, atau spasial, yakni turunan level provinsi adalah kabupaten/ kota, yang dipilih ialah kota Bandar Lampung. Pada sisi holistik -menyangkut relevansi tiap data. Selama ini yang terjadi data terpilah dan terjadi ego sektoral penanganannya. Maka tahap pertama adalah mengelompokkan data menjadi satu unit yang terpadu (*integrative*) dan terlokus di tingkat kota, bukan hanya di level provinsi. Hasil pengolahan data menunjukkan membaiknya perkembangan kualitas hidup manusia di kota Bandar Lampung yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil ditunjukkan gambaran *trend* seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.
Gambaran Parsial Masing-masing Kondisi Pembangunan Manusia di kota Bandar Lampung



Gambar 4. Usia Harapan Sekolah

Terlihat bahwa kondisi pandemi Covid-19 memberikan dampak terjadinya perlambatan pertumbuhan manusia hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk besarnya nilai IPM. Namun di kota Bandarlampung, IPM tetap mengalami peningkatan, trend semenjak tahun 2017. Tahun 2022 IPM di Bandar Lampung mencapai 78,01, lebih dari IPM nasional. Kenaikan IPM Bandar Lampung didukung oleh naiknya variabel pendukungnya. Hampir semua mengalami kenaikan, hanya indikator

“harapan lama sekolah” dan “rata-rata lama sekolah” yang stagnan, selebihnya mengalami kenaikan. Terutama kenaikan pada angka harapan hidup, yang mendekati 0,24 poin. Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan - juga mengalami peningkatan. Seperti yang tersaji di bawah ini

Pada dua dimensi lainnya yaitu Dimensi Kesehatan dan Pendidikan (yang merupakan layanan dasar) capaiannya masih mengalami peningkatan tipis di masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

pusat dan daerah tetap hadir untuk meningkatkan kualitas layanan di kedua dimensi tersebut di Bandarlampung.

Dalam perkembangannya sebagian besar indikator pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun secara faktual pembangunan manusia di Kota Bandarlampung masih terkendala oleh

sejumlah permasalahan sebagaimana tercermin dari progresifitas peningkatannya yang kurang sesuai harapan. Terkait kesimpulan tersebut, pendekatan HITS memberi saran yang kurang lebih dapat dimatrikskan sebagai berikut.

I	Integrasi data	H	Dikerjakan oleh semua stakeholders Pembagian peran yang jelas
T	Penurunan stunting Penanggulangan kemiskinan	S	Lokasi: kota Bandar Lampung

Gambar 5. Matriks Pendekatan HITS

Keterangan: H= holistic, I= integrative, T= thematic, S = spatial

Terkait gambar 4 (empat) di atas maka pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam menumbuhkembangkan semangat gotong royong dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Meski sejumlah indikator makro perekonomian dan keuangan daerah menunjukkan trend peningkatan yang cukup memuaskan, terutama sebelum terdampak dahsyat oleh pandemi pada tahun 2020, secara umum kota Bandar Lampung masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, daya saing daerah, serta beragam permasalahan yang terkait dengan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Atas dasar analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah di atas, dapat dirumuskan strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah. Permasalahan pembangunan daerah ditas memberi gambaran bahwa pendekatan alternatif, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif bagi daerah yang banyak mempunyai desa-desa, Kawasan perdesaan yang terpencil, tertinggal, dan rawan bencana.

Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa. b. Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. c. Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan. b. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan temuan dan analisa capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Kota Bandar Lampung, beberapa hal dapat ditarik sebagai kesimpulan dan tindak lanjut dari kajian ini adalah perlunya pemberdayaan masyarakat di kota Bandar Lampung, terutama yang berkaitan dengan penguatan koordinasi.

Bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan adalah menyusun usulan rencana alternatif kebijakan yang tujuannya diarahkan untuk mempercepat capaian pembangunan manusia yang maksimal melalui pendekatan koordinasi dan kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan. Usulan rencana alternatif kebijakan yang disusun diarahkan pada penanggulangan kemiskinan (ekstrem), dan percepatan penurunan stunting.

Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian yang efektif perlu dikaji terus, dan dilaksanakan secara melembaga. Kegiatan ekonomi dengan laju pertumbuhan konstan di PDRB salah satunya adalah pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut memiliki stabilitas perkembangan yang baik. Sementara dari jenis pekerjaan lapangan usahanya sendiri, lapangan usaha ini adalah termasuk pekerjaan yang bersifat inklusif dan dapat dikembangkan dengan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melibatkan masyarakat miskin dalam tata kelolanya.

Keberhasilan program pembangunan manusia dan kebudayaan akan sangat tergantung pada koordinasi, kolaborasi dan peran dari masing-masing bidang. Diharapkan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan di sektor masing-masing atau kementerian/lembaga dapat mendukung pelaksanaan percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem, pengurangan stunting, penanggulangan bencana, dan revitalisasi vokasi. Termasuk memanfaatkan peluang kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bandar Lampung. Maka dengan mempergunakan HITS dapat untuk mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat, dengan cara memberi rekomendasi melalui pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan

pemerintah dari tingkat kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, Rochmin, Iwan Nugroho (2004), *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta
- Dwijowidjoto, Riant Nugroho (2010), *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi*, PT Elexmedia, Jakarta
- Kartasmita, Ginandjar (1995), "Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri: Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan peran Birokrasi Dalam Pembangunan", Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelas Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 15 April, 1995.
- Mubyarto (1998), "Menuju Keamanan Pangan: Krisis Ekonomi Bukan Krisis Pertanian", makalah untuk Seminar Nasional Ketahanan Pangan di Universitas Janabadra, Yogyakarta, 17 Oktober 1998.
- Sumodiningrat, Gunawan (1997), *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi II, PT. Bina Row Pariwara, Jakarta.
- Achmad, Yuni Andono (2022), "Penggunaan *Balance Score Card* untuk Penyusunan Manual Indikator di dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga", *Jurnal UG*, Volume 16 Nomor 10 bulan Oktober 2022
- Yustika, Ahmad Erani & Rukavina Baksh (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Perdesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*. Penerbit: Empat-dua Media. Malang
- Wrihatnolo, Rizang Randy, *Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah, untuk Provinsi Papua*, power point di slideshare .com
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025)
 - , Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 - , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - , Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - , Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026